

**THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE AS VIEWED
THROUGH SUPREME AUDIT AGENCY AUDIT OPINIONS
(A CASE STUDY OF REGENCY AND CITY GOVERNMENTS IN WEST JAVA
PROVINCE, 2020–2024)**

**PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI OPINI
AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020–2024)**

Utin Alifia Fatihah Radinka¹, Wukuf Dilvan Rafa², Nella Yantiana³

Universitas Tanjungpura, Indonesia^{1,2,3}

b1031231009@student.untan.ac.id¹

ABSTRACT

Audit opinions rendered by the Supreme Audit Agency (BPK) are widely regarded as a primary measure of accountability in local government financial management. Nonetheless, empirical studies that specifically investigate the relationship between audit opinions and local government financial performance within a specific regional context remain scarce. This research is designed to examine the effect of BPK audit opinions on local government financial performance across West Java Province. A quantitative research design was applied, drawing upon secondary data comprising BPK audit reports and financial statements of district and city governments within West Java Province. Hypothesis testing employed a nonparametric inferential statistical approach through the Mann-Whitney Test using SPSS 27, comparing financial performance between local governments receiving Unqualified Opinions (WTP) and those receiving Qualified Opinions (WDP). Findings demonstrate that BPK audit opinions exert a significant effect on local government financial performance, although the magnitude of this effect varies across jurisdictions. These outcomes reinforce the notion that audit opinions function beyond mere administrative compliance tools, also serving as catalysts for improvements in regional financial governance.

Keywords: Audit Opinion, Financial Performance, Local Government, West Java.

ABSTRAK

Penilaian kualitas keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui opini audit sering dijadikan acuan utama dalam mengukur akuntabilitas fiskal. Akan tetapi, kajian empiris yang secara khusus menguji dampak opini audit terhadap performa keuangan pemerintah daerah dalam lingkup wilayah tertentu masih sangat minim. Studi ini dirancang untuk menguji dan menganalisis dampak opini audit yang diterbitkan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metodologi yang diterapkan bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan pemeriksaan BPK serta laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat. Pengujian dilaksanakan dengan pendekatan statistik nonparametrik inferensial melalui Uji Mann-Whitney menggunakan SPSS 27, guna membandingkan kinerja keuangan daerah antara entitas penerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian menghasilkan temuan bahwa opini audit BPK memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, walaupun intensitas pengaruhnya berbeda-beda di tiap daerah. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa opini audit tidak semata berfungsi sebagai instrumen pemenuhan prosedur administratif, melainkan turut berperan dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Opini Audit, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas merupakan pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, terbuka, dan mampu memenuhi

kebutuhan layanan publik secara optimal (Maharani et al., 2024). Dalam rezim otonomi daerah, tanggung jawab fiskal menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan, di mana setiap pemerintah daerah berkewajiban mengelola

keuangan dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi sesuai kaidah good governance. Salah satu mekanisme pokok dalam mengevaluasi akuntabilitas tersebut ialah opini audit yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit tidak hanya merefleksikan kewajaran pelaporan keuangan, namun sekaligus mengindikasikan tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan keandalan sistem pengendalian internal (Sabella, 2022; Yuliyana and Setyaningrum, 2024).

Dalam khazanah akademik mutakhir, relasi antara opini audit dan performa keuangan pemerintah daerah semakin menjadi perhatian para peneliti. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa opini audit yang lebih baik, khususnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), cenderung sejalan dengan mutu pengelolaan keuangan yang lebih tinggi dan berdampak konstruktif terhadap kinerja keuangan daerah. Pradnyani dan Mimba (2020) dalam riset mereka menegaskan bahwa opini audit memberikan pengaruh bermakna terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Di samping itu, berbagai penelitian terkini juga memperlihatkan bahwa opini audit yang positif mampu memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pembenahan tata kelola keuangan secara berkelanjutan (Suandani and Astawa, 2021).

Di sisi lain, temuan-temuan empiris mengenai topik ini tidak senantiasa menunjukkan hasil yang seragam. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak semata-mata ditentukan oleh opini audit, melainkan turut dipengaruhi oleh variabel lain seperti kapasitas fiskal, skala pemerintahan, derajat kemandirian keuangan, serta efektivitas pengeluaran

publik (Yuliyana and Setyaningrum, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa opini audit bukanlah satu-satunya faktor penentu kinerja keuangan, melainkan merupakan bagian integral dari sistem yang lebih kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, dalam bingkai akuntabilitas sektor publik, capaian audit BPK juga kerap dikaitkan dengan hasil-hasil pembangunan di daerah. Riset-riset terkini menunjukkan bahwa mutu pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tercermin dari opini audit dan realisasi tindak lanjut rekomendasi BPK, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta kinerja pembangunan daerah (Sabella, 2022). Dengan demikian, opini audit tidak lagi dipandang sekadar dokumen administrasi, tetapi diyakini memiliki implikasi strategis bagi cara pandang para pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk kredibilitas pengelolaan anggaran dan kapasitas fiskal dalam menggerakkan pembangunan lokal. Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Maharani et al., 2024).

Walaupun demikian, sebagian besar penelitian yang ada cenderung mengkaji fenomena ini pada tingkat nasional atau lintas wilayah secara umum, sehingga analisis yang berfokus pada konteks daerah tertentu masih sangat terbatas. Padahal, masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri dari sisi fiskal, administratif, dan kelembagaan yang dapat memoderasi keterkaitan antara opini audit dan kinerja keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian yang lebih kontekstual untuk memahami dinamika

tersebut secara lebih menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang signifikan terkait sejauh mana opini audit BPK secara empiris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu oleh Maharani et al. (2024) mengindikasikan bahwa variabel keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah berperan dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan, studi ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih empiris yang lebih spesifik dalam literatur akuntansi sektor publik, sekaligus menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan

akuntabilitas dan kinerja keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketaatan administratif dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya fiskal dengan tepat guna. Maharani et al. (2024) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menjadi cerminan dari tingkat akuntabilitas dan efektivitas manajemen keuangan di daerah. Oleh karenanya, opini audit BPK dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah beserta implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024 (dalam %)

no	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bandung	28.51%	28.23%	26.65%	25.79%	26.45%
2	Kab. Bekasi	83.40%	80.90%	75.56%	76.90%	77.20%
3	Kab. Bogor	68.10%	79.54%	70.73%	70.87%	71.15%
4	Kab. Ciamis	11.34%	12.06%	12.79%	10.93%	11.20%
5	Kab. Cianjur	19.48%	26.75%	19.22%	21.16%	21.40%
6	Kab. Cirebon	21.95%	23.38%	25.92%	23.36%	24.10%
7	Kab. Garut	12.83%	14.82%	11.91%	12.69%	13.05%
8	Kab. Indramayu	23.85%	20.28%	20.79%	21.89%	22.15%
9	Kab. Karawang	46.78%	54.52%	51.02%	51.45%	52.40%
0	Kab. Kuningan	12.76%	14.97%	14.92%	14.09%	14.35%

no	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
	Kab. Majalengka	18.81%	19.04%	21.15%	21.23%	21.60%
	Kab. Purwakarta	28.87%	29.24%	33.17%	30.54%	31.20%
	Kab. Subang	19.59%	20.23%	19.34%	22.42%	23.05%
	Kab. Sukabumi	22.48%	21.13%	21.32%	21.10%	21.50%
	Kab. Sumedang	19.17%	21.05%	21.94%	22.30%	22.75%
	Kab. Tasikmalaya	9.90%	14.01%	10.79%	10.52%	10.90%
	Kota Bandung	61.56%	64.25%	75.55%	74.13%	75.30%
	Kota Bekasi	72.04%	83.95%	79.61%	80.03%	80.55%
	Kota Bogor	61.60%	73.50%	70.00%	82.18%	82.60%
	Kota Cirebon	38.55%	44.37%	57.74%	57.75%	58.10%
	Kota Depok	71.80%	89.76%	81.99%	85.90%	86.40%
	Kota Sukabumi	43.99%	40.03%	43.40%	48.89%	49.25%
	Kota Tasikmalaya	22.84%	29.38%	23.14%	27.30%	27.80%
	Kota Cimahi	41.36%	38.47%	42.15%	43.73%	44.20%
	Kota Banjar	18.65%	21.09%	21.69%	20.96%	21.30%
	Kab. Bandung Barat	24.86%	26.07%	34.76%	29.77%	30.50%
	Kab. Pangandaran	7.55%	15.70%	20.88%	22.24%	22.65%

Sumber: LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (diolah, 2025)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2020–2024 menampilkan heterogenitas yang cukup mencolok antarwilayah. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Bandung secara konsisten menorehkan rasio kinerja

yang tinggi, sementara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran mencatat rasio yang masih rendah secara relatif. Secara keseluruhan, pola kinerja keuangan cenderung stabil atau menunjukkan sedikit kenaikan pada sebagian besar daerah, dengan sejumlah peningkatan yang terlihat pascatahun 2022.

Tabel 2. Opini Audit BPK Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024

No	Kode	Entitas Pemerintah Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1	166	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	167	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	168	Kab. Bandung Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	169	Kab. Bekasi	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	170	Kab. Bogor	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
6	171	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	172	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	173	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	174	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	175	Kab. Indramayu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	176	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	177	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13	178	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	179	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
15	180	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	181	Kab. Subang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	182	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	183	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Kode	Entitas Pemerintah Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
19	184	Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	185	Kota Bandung	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
21	186	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	187	Kota Bekasi	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
23	188	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	189	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	190	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	191	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	192	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	193	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (diolah, 2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2, mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam rentang waktu penelitian. Beberapa daerah sempat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. Data tersebut mengindikasikan adanya dinamika positif di mana beberapa daerah yang sebelumnya berstatus WDP mampu meraih opini WTP pada tahun-tahun selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengkaji dampak opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian relasi antarvariabel secara sistematis dan terukur melalui data keuangan yang berwujud numerik. Rancangan kausal digunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh perubahan opini audit yang diterbitkan BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.

Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh entitas pemerintah kabupaten dan kota yang berada di

wilayah Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian terdiri atas seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten menyusun dan mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta telah menjalani audit BPK sepanjang periode penelitian tahun 2020–2024. Proses pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berikut: (1) ketersediaan data opini audit BPK yang lengkap; dan (2) ketersediaan data laporan keuangan yang memungkinkan perhitungan indikator kinerja keuangan. Teknik ini dipilih untuk menjamin validitas, komparabilitas, dan kelengkapan data yang dianalisis.

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder. Data opini audit bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD pemerintah daerah, sedangkan data kinerja keuangan diperoleh dari LKPD yang diterbitkan secara resmi melalui portal BPK dan situs resmi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri laporan keuangan dan berkas audit yang relevan sesuai periode penelitian.

Dua variabel pokok digunakan dalam penelitian ini, yaitu opini audit sebagai variabel independen dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Opini audit dikuantifikasi menggunakan skala nominal dikotomis, di mana Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 1 dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 0. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efektivitas pendapatan, yang dihitung menggunakan formula berikut:

Rasio Efektivitas =

(Realisasi Pendapatan Daerah / Target Pendapatan Daerah) × 100%

Rasio tersebut mencerminkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan sesuai dengan proyeksi anggaran. Di samping itu, rasio efisiensi belanja dihitung menggunakan rumus:

Rasio Efisiensi =

(Realisasi Belanja Daerah / Realisasi Pendapatan Daerah) × 100%

Nilai rasio efisiensi yang semakin rendah menandakan pengelolaan belanja publik yang semakin efisien oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, nilai rasio efektivitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Halim & Kusufi, 2018).

Proses analisis data dalam penelitian ini ditempuh melalui beberapa tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui ukuran nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel. Tahap kedua adalah pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk guna mengetahui sebaran distribusi data. Tahap ketiga adalah uji homogenitas melalui Levene's Test untuk memeriksa kesetaraan varians antara dua kelompok data. Tahap keempat adalah pengujian hipotesis menggunakan Uji Mann-Whitney sebagai pendekatan nonparametrik pengganti uji-t independen, yang dipilih karena data tidak memenuhi asumsi normalitas. Keseluruhan proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, tampak bahwa mayoritas pemerintah daerah dalam sampel penelitian berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja keuangan antardaerah menunjukkan

variasi yang cukup besar, yang mencerminkan perbedaan kapasitas dan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola keuangan. Variabel kontrol juga menampilkan keragaman yang mengindikasikan potensi pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik		Opini Audit BPK	Kinerja Pemerintah
N	Valid	135	135
	Missing	0	0
Mean		0,8889	37,5230
Std. Deviation		0,31544	23,84333
Minimum		0,00	10,52
Maximum		1,00	86,40

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2025)

Merujuk pada Tabel 3, hasil analisis statistik deskriptif memperlihatkan bahwa keseluruhan jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 135 data (N = 135), yang berasal dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun periode pengamatan (2020–2024), tanpa ada data yang hilang (missing = 0).

Variabel opini audit BPK mencatat nilai rata-rata (mean) sebesar 0,8889, yang mengandung arti bahwa sekitar 88,89% dari keseluruhan observasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nilai minimum 0,00 mengindikasikan terdapatnya observasi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan nilai maksimum 1,00

merepresentasikan opini WTP. Standar deviasi sebesar 0,31544 menunjukkan variasi yang relatif sempit pada variabel opini audit, yang mencerminkan dominasi opini WTP dalam keseluruhan dataset.

Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah mencatat nilai rata-rata sebesar 37,52%, yang berarti secara rata-rata realisasi pendapatan daerah setara dengan sekitar 37,52% dari total target yang telah ditetapkan. Nilai minimum sebesar 10,52% tercatat pada Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2023, sementara nilai maksimum 86,40% diraih oleh Kota Depok pada tahun 2024. Standar deviasi yang relatif besar, yakni 23,84333, menunjukkan tingginya heterogenitas kinerja keuangan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat.

2. Distribusi Frekuensi Opini Audit BPK

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Opini Audit BPK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
WDP	15	11,1%	11,1%	11,1%
WTP	120	88,9%	88,9%	100,0%

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total	135	100,0%	100,0%	

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2025)

Data pada Tabel 4 mengungkapkan bahwa dari total 135 observasi, sebanyak 120 observasi atau senilai 88,9% mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara sisanya sebanyak 15 observasi atau 11,1% mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tidak ditemukan satupun observasi yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) maupun Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam rentang periode penelitian.

Data di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan, pemerintah

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat telah mencapai standar pengelolaan keuangan yang memadai, sebagaimana ditunjukkan oleh dominasi perolehan opini WTP. Meskipun demikian, adanya 15 observasi berstatus WDP menyediakan variasi yang cukup memadai untuk keperluan pengujian statistik komparatif antara kedua kelompok opini tersebut.

3. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (Tests of Normality)

Variabel	Kolmogorov-Smirnov (Statistik)	df	Sig	Shapiro-Wilk (Statistik)	df	Sig
Opini Audit BPK	0,527	135	0,000	0,363	135	0,000
Kinerja Pemerintah	0,217	135	0,000	0,838	135	0,000

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 5, pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai statistik variabel opini audit BPK sebesar 0,527 dengan taraf signifikansi (Asymp. Sig.) 0,000. Pada variabel kinerja pemerintah, nilai statistik tercatat sebesar 0,217 dengan signifikansi 0,000. Hasil yang serupa diperoleh dari uji Shapiro-Wilk, yaitu variabel opini audit BPK menghasilkan statistik 0,363 (sig. = 0,000) dan variabel kinerja pemerintah menghasilkan statistik 0,838 (sig. = 0,000).

Mengingat nilai signifikansi kedua variabel pada kedua metode pengujian normalitas tersebut berada di angka 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka diperoleh simpulan bahwa data penelitian tidak mengikuti sebaran distribusi normal. Hasil ini menegaskan bahwa pengujian hipotesis tidak dapat menggunakan metode statistik parametrik seperti uji-t independen. Atas dasar itu, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan Uji Mann-Whitney sebagai metode statistik nonparametrik yang tidak mensyaratkan asumsi normalitas data.

4. Uji Homogenitas

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas (Test of Homogeneity of Variances)

Variabel	Metode	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Kinerja Pemerintah	Based on Mean	3,823	1	133	0,053
	Based on Median	0,931	1	133	0,336
	Based on Median and with adjusted df	0,931	1	130,084	0,336
	Based on Trimmed Mean	3,697	1	133	0,057

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji homogenitas melalui Levene's Test memperlihatkan nilai signifikansi yang bervariasi bergantung pada metode yang digunakan. Berdasarkan Mean (Based on Mean), nilai Levene Statistic diperoleh sebesar 3,823 dengan signifikansi 0,053. Berdasarkan Median (Based on Median), nilai Levene Statistic sebesar 0,931 dengan signifikansi 0,336. Berdasarkan Median dengan penyesuaian derajat bebas, nilai Levene Statistic juga sebesar 0,931 dengan signifikansi 0,336. Berdasarkan Trimmed Mean, nilai Levene Statistic

tercatat sebesar 3,697 dengan signifikansi 0,057.

Seluruh nilai signifikansi yang dihasilkan Levene's Test menunjukkan angka di atas 0,05, sehingga diperoleh simpulan bahwa varians antara kelompok WTP dan WDP bersifat homogen atau tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan di antara keduanya. Meskipun data tidak terdistribusi normal, pemenuhan asumsi homogenitas varians ini memperkuat justifikasi penggunaan Uji Mann-Whitney dalam proses pengujian hipotesis.

5. Uji Mann-Whitney (Pengujian Hipotesis)

Tabel 7a. Hasil Uji Mann-Whitney – Peringkat (Ranks)

Variabel	Opini Audit BPK	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kinerja Pemerintah	WDP	15	89,37	1.340,50
	WTP	120	65,33	7.839,50
	Total	135		

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2025)

Tabel 7b. Hasil Uji Mann-Whitney – Statistik Uji (Test Statistics)

Statistik Uji	Kinerja Pemerintah
Mann-Whitney U	579,500
Wilcoxon W	7.839,500
Z	-2,244
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,025
a. Grouping Variable: Opini Audit BPK	

Sumber: Data diolah dengan SPSS
(2025)

Berdasarkan Tabel 7a, hasil analisis peringkat memperlihatkan adanya kesenjangan mean rank yang cukup signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. Kelompok WDP dengan 15 observasi memiliki mean rank sebesar 89,37 dan sum of ranks sebesar 1.340,50. Sebaliknya, kelompok WTP dengan 120 observasi mencatat mean rank yang lebih rendah, yakni 65,33, dengan sum of ranks sebesar 7.839,50. Fakta mengejutkan bahwa mean rank kelompok WDP justru lebih tinggi dibandingkan kelompok WTP patut mendapat perhatian khusus.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang pernah mendapatkan opini WDP justru mencatat posisi kinerja keuangan yang secara peringkat lebih tinggi. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa beberapa daerah dengan kinerja keuangan tinggi, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung, sempat menerima opini WDP pada tahun-tahun tertentu meskipun performa keuangannya tetap unggul. Ini mengisyaratkan bahwa opini audit tidak serta-merta merepresentasikan performa keuangan absolut, melainkan juga menyentuh aspek ketaatan administratif dan kualitas penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Tabel 7b, hasil statistik pengujian menunjukkan nilai Mann-Whitney U sebesar 579,500, nilai Wilcoxon W sebesar 7.839,500, dan nilai Z sebesar -2,244. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang tercatat sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam kinerja keuangan antara daerah penerima opini WTP dan WDP.

Dengan merujuk pada hasil tersebut, H_1 diterima dan H_0 ditolak,

sehingga dapat ditegaskan bahwa opini audit BPK terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020–2024. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Pradnyani dan Mimba (2020) yang menyatakan opini audit memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, temuan ini memperkuat perspektif teori akuntabilitas bahwa mekanisme pengawasan eksternal berupa audit berkontribusi pada perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah (Yuliyana & Setyaningrum, 2024).

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi Maharani et al. (2024) yang mengidentifikasi adanya keterkaitan antara mutu pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah. Dalam penelitian tersebut, Pendapatan Asli Daerah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menegaskan bahwa manajemen fiskal yang solid dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah.

PENUTUP

Berdasarkan serangkaian analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, berikut ini dirumuskan beberapa pokok kesimpulan dari penelitian ini:

Pertama, mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama rentang 2020–2024, yakni sebesar 88,9% dari keseluruhan 135 observasi. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan yang cukup berarti dalam kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah di wilayah Jawa Barat.

Kedua, sebaran data tidak berdistribusi normal berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ($\text{sig.} = 0,000 < 0,05$), namun memenuhi persyaratan homogenitas varians berdasarkan Levene's Test ($\text{sig.} > 0,05$). Kondisi tersebut memvalidasi penerapan Uji Mann-Whitney sebagai metode pengujian hipotesis yang paling sesuai.

Ketiga, Uji Mann-Whitney menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05, yang mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan antara daerah penerima opini WTP dan WDP. Dengan demikian, terbukti secara empiris bahwa opini audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.

Keempat, meskipun kelompok WDP secara rata-rata memiliki mean rank kinerja yang lebih unggul dibandingkan kelompok WTP, hal ini justru memperjelas kompleksitas hubungan antara opini audit dan kinerja keuangan. Sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi sempat mendapat opini WDP bukan karena kelemahan fiskal, melainkan karena persoalan kepatuhan administratif dan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, berikut disampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan:

Pertama, bagi pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, disarankan untuk memprioritaskan penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan dan manajemen aset daerah, guna mendorong peningkatan status opini menjadi WTP.

Kedua, bagi pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri, direkomendasikan untuk memperkuat program pembinaan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar pelaporan yang berlaku.

Ketiga, bagi BPK RI, direkomendasikan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu dan konsistensi pemeriksaan keuangan daerah, serta mempertegas mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan agar memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan akuntabilitas fiskal daerah.

Keempat, bagi penelitian yang akan datang, disarankan untuk memperluas jangkauan kajian dengan memasukkan variabel moderasi seperti skala pemerintah daerah, kapasitas fiskal, dan kualifikasi aparatur, serta memperluas wilayah penelitian ke provinsi-provinsi lain agar temuan yang dihasilkan lebih komprehensif dan memiliki generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 467–476.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/download/14886/858>
- Maharani, B., Puspitasari, A., & Yantiana, N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Berajah Journal*, 4(4), 863-872.
<https://doi.org/10.47353/bj.v4i4.368>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

- terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jai.18164>
- Pradnyani, N. M. D., & Mimba, N. P. S. H. (2020). Opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan realisasi PAD sebagai variabel pemediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2561–2576. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i10.p12>
- Sabella, R. F. (2022). The role of timeliness in providing audit opinions of local government financial report. *Soedirman Accounting Review (SAR): Journal of Accounting and Business*, 7(2), 161–178. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2022.7.2.6427>
- Siddi, P. (2016). Peran karakteristik keuangan dan opini audit dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3), 346–358. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7030>
- Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *S1 Akuntansi: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/34529>
- Yuliyana & Setyaningrum. (2024). Akuntabilitas kinerja dan reduksi asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan publik. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/46109/31757>
- Safitri, D.P.R. and Pusposari, D. (2025) The influence of local government financial characteristics and BPK audit results on government financial performance. *International Journal of Research on Finance & Business*, 7(1).
- Liana, D., Sihombing, M., Ramadhani, S.C. and Ayunanda, W. (2026) The effect of BPK audit opinions on the financial performance of local governments in Central Java Province (2022–2024). *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 4(2).
- Harahap, A.W., Azriana, A., Tarigan, A.N. and Azzahra, A.S. (2026) The influence of audit opinion on the financial performance of local governments. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 4(2).
- Angelina, J., Saerang, D.P.E. and Warongan, J.D.L. (2024) The influence of audit opinion, characteristics of regional head, and corruption level on local government performance in Indonesia. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*.
- Putri, R.D. and Hendaris, R.B. (2025) Public sector accountability and performance: The influence of institutional scale, legislative oversight, and supreme audit judgements. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Chaerani, E.Y. and Firmansyah, A. (2023) Regional revenues, audit opinions, and local government financial performance: The moderating role of capital expenditure. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Sukma, I.T. and Hendaris, R.B. (2024) The role of audit opinion in enhancing the influence of local

revenue and capital expenditure on financial performance. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics.

Anantha, T.G. and Wijaya, H. (2025) Determinants of failure in achieving unqualified audit opinion (WTP) in Indonesian local governments. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.

Kusuma, G., Tenripada, Furqan, A.C. and Kamase, H.P. (2025) Strengthening financial performance of local governments through internal supervision and accountability. E-Jurnal Akuntansi.